IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MELALUI ELEKTRONIK WARUNG

(Studi Pada Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

AYUNI ZALITA PEPI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRACT

IMPLEMENTATION PROGRAM OF BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) THROUGH ELEKTRONIK WARUNG (Study On Rajabasa Jaya Village, Rajabasa District, Bandar Lampung City)

By

AYUNI ZALITA PEPI

The target group of beneficiaries of the Bantuan Pangan Non Tunai Program complained that in the distribution of BPNT there were often constraints on utilization, namely the late entry balance due to lack of coordination and supervision carried out during distribution. The purpose of this study was to determine the implementation of the BPNT program through electronic warung in the Village of Rajabasa Jaya, Rajabasa District, Bandar Lampung City. This type of research uses descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, documentation and observation. This study focuses on three indicators, namely the characteristics of the problem, program characteristics and environmental variables. The results of this study are that the Implementation of the BPNT Program through e-warung shows that the BPNT Program has not been able to fulfill the portion of the basic needs of KPM (Keluarga Penerima Manfaat) after calculating consumption per day and the BPNT Program is not on target. Lack of planning and supervision causes utilization problems such as late entry and lost cards. The allocation of resources is considered to be lacking in training and debriefing to assistants, the implementation mechanism has not been properly monitored. For sufficient environmental variables, the social economic conditions of the community have supported but the quality of rice provided is still not good.

Keywords: Implementation, Bantuan Pangan Non Tunai, Elektronik Warung.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MELALUI ELEKTRONIK WARUNG (Studi Pada Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung)

Oleh

AYUNI ZALITA PEPI

Kelompok sasaran penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai mengeluhkan bahwa dalam penyaluran BPNT sering terjadi kendala pemanfaatan yaitu saldo terlambat masuk disebabkan kurangnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pada saat penyaluran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program BPNT melalui elektronik warung di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini memfokuskan pada tiga indikator yaitu karakteristik masalah, karakteristik program dan variabel lingkungan. Hasil penelitian ini ialah Implementasi Program BPNT melalui e- warung menunjukkan bahwa Program BPNT belum dapat memenuhi jumlah sebagian kebutuhan pokok KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT setelah di hitung konsumsi per hari dan Program BPNT belum tepat sasaran. Kurangnya perencanaan dan pengawasan menyebabkan permasalahan pemanfaatan seperti saldo terlambat masuk dan kartu hilang. Alokasi sumber daya dinilai masih kurang belum adanya pelatihan maupun pembekalan kepada pendamping, mekanisme pelaksanaan belum di awasi dengan baik. Untuk variabel lingkungan cukup dari kondisi ekonomi sosial masyarakat sudah mendukung namun kualitas beras yang diberikan masih kurang baik.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Elektronik Warung.

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MELALUI ELEKTRONIK WARUNG
(Studi Pada Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)

Oleh

AYUNI ZALITA PEPI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	: **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MELALUI ELEKTRONIK WARUNG (Studi pada Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa	: *Ayuni Zalita Pepi*
No. Pokok Mahasiswa	: **1516021107**
Jurusan	: **Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Pitojo Budiono, M.Si.	**Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**
NIP 19640508 199303 1 004	NIP 19570728 198703 1 006

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.** .....

   Sekretaris : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.** .....

   Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **02 April 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 01 April 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
DFG79AFF840356446
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ayuni Zalita Pepi
NPM. 1516021107

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ayuni Zalita Pepi, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 06 Juni 1997, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri pasangan Bapak Ermanto dan Ibu Eli Suryana.

Jenjang pendidikan penulis adalah TK Ismaria Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003. Penulis melanjutkan ke SD Negeri 1 Rajabasa Raya yang diselesaikan tahun 2009, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 22 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 13 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2015 dengan hasil yang baik.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN Tertulis. Pada Januari 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Betung, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari. Pada Mei 2018 penulis pernah mengikuti kegiatan survey politik tentang Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan Demokrasi Prosedural dan pada April 2019 penulis menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kelurahan Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

Janganlah Kamu Kehilangan Harapan dan Jangan Pula Bersedih Hati

(QS. Ali Imran: 139)

Dari abu hurairah r.a rasulullah saw bersabda hindarilah prasangka, karena prasangka itu berita paling bohong. Jangan saling mencari keburukan orang. Jangan saling mengorek rahasia orang lain dan saling menyaingi jangan saling mendengki, jangan saling marah dan jangan saling acuh, tetapi jadilah kamu semua bersaudara sebagai hamba-hamba allah

(Hadis Riwayat Muslim)

Better to feel how hard education is at this time rather than feel the bitterness of stupidity, later.
(Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang daripada merasakan pahitnya kebodohan kelak)

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Segala Hormat Puji dan Syukur atas rahmad dan ridho Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan nikmat dan berkah-Nya di setiap hembusan nafas, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini :

Kupersembahkan Karya ini
Kepada:

Ayah dan Ibu tercinta
Ermanto dan Eli Suryana

Kakak dan Adikku tersayang
Afrizka Amidya, S.Kom dan Hanzaqi Alfayed

Sahabat-sahabat seperjuangan, serta

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillahirrobil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Elektronik Warung (Studi Pada Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas serta selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini
4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan motivasi demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan support sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Terutama dan teristimewa kepada kedua orangtuaku yang telah memberikan kepercayaan, dukungan serta doa kepadaku selama ini sehingga dapat terciptanya karya tulis ini. Kepada kakak dan adikku terimakasih support yang telah diberikan semoga kita dapat senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.
7. Kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang sudah banyak membantu dalam kelancaran penelitian ini. Terkhusus kepada Bapak Santoso Adhy S, SE.MM, Ibu Diah Eko Erma dan Mas Rio Dedi Allantara yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam penelitian. Terima kasih atas saran, motivasi serta bantuan yang telah diberikan selama saya melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

8. Terimakasih kepada KPM BPNT dan Non KPM BPNT di Kelurahan Rajabasa Jaya, yang telah bersedia membantu selama penelitian.
9. Terimakasih kepada sahabatku Farkhana April L, Bestha Lady, Salvia Ferziani Salim, Suci Natasia Putri, Singindah Rosidikana Putri, Diah Ayu R dan Mia Abi Nisa. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua nya terwujud ya! Aamiin
10. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Adinda Prima Cella. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita terwujud ya der. Aamiin
11. Kepada sahabatku Anisa Rizki, Zenia Fidia Wati, Rachmiati Sari. Terimakasih semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua nya terwujud ya! Aamiin
12. Kepada sahabat perkuliahan yang selalu ada setiap saat Dewi Aria Kusuma Putri, terimakasih ya dewi semoga sukses selalu dan apa yang diinginkan tercapai.
13. Terima kasih kepada Annisa Putri, Diah Wilantika R, Anmeysa Yola. Sukses selalu guys!!
14. Temen-temen KKN Desa Betung Bestha, Mba Tiara, Mba Atul, Bang Dzaky, Bang Edi, Yudha, Ajeng, Hesti, Eka, Intan, Bang Goy, Bang Edi Sarjono dan Rizki Firmanto. Semoga cepet wisuda semua yaa, lalu kita silaturahmi lagi ke Betung.
15. Kepada Fajar, Tita dan Berry. Terima kasih dan semoga suskes ya skripsi nya.
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 15: Nur Indah, Amelisa Nurzahara, Ni Kadek Poniasih, Hardiningtyas, Merita Andriani, Irda

Yustina, Fernanda, Dina Mei, Sekar Arum, Diska, Adriani, Desi Wulandari, Ning, Masrany, Destriana, Ifa, Bagas, Acel, Amelia D, Tiolina, Prasetyo Buana, Putri Wahyu, Untsa, Rossa, Linda, Anisantika, Fani Destia, Surya Hadi Pratama, Hadian, Elania Sukma Nabilla, Faradiba Fasha, Dara Atika, Iga, Fitri Nestia, Oktadilla, Aji Rachmansyah, Ivan Maulana, Richo Riansyah, Zakki, Ghofur, Ferdi, Robby, Alek, Riko Pambudi, Ahmad Dedi, Meisandra, Lisda dan semua yang tidak tersebut Ilmu Pemerintahan 15. Terima kasih sudah menjadi bagian yang penting dalam masa perkuliahan.

17. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 02 April 2019
Penulis

Ayuni Zalita Pepi

DAFTAR ISI

Halaman

ASBTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR SINGKATAN

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kebijakan Publik 12
B. Implementasi Kebijakan Publik 14
1. Implementasi Kebijakan 14
2. Model Implementasi Kebijakan 16
C. Tinjauan Tentang Program 24
D. Tinjauan Tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 25
1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai 25
2. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai 26
E. Tinjauan Tentang Elektronik Warung 27
1. Pengertian E-Warung 27
2. Fungsi E-Warung 28
F. Tinjauan Tentang Kemiskinan 29
1. Definisi Kemiskinan 29
2. Ukuran Kemiskinan 30
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan 33
G. Tinjauan Tentang Manajemen 34
1 Definisi Manajemen 34
2 Fungsi-fungsi Manajemen 36
H. Tinjauan Tentang Interaksi Sosial 43
1. Pengertian Interaksi Sosial 43
2. Syarat-Syarat Terjadi Interaksi Sosial 46

I. Kerangka Berpikir 47

III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 48
B. Fokus Penelitian 49
C. Lokasi Penelitian 50
D. Jenis dan Sumber Data 51
E. Informan..... 52
F. Teknik Pengumpulan Data 53
G. Teknik Pengolahan Data 54
H. Teknik Analisis Data 55
I. Teknik Keabsahan Data 57

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Lokasi Penelitian 58
B. Sejarah Singkat Kelurahan Rajabasa Jaya Bandar Lampung 59
C. Gambaran Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai 61
D. Elektronik Warung 65

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 68
1. Karakteristik Masalah 68
2. Karakteristik Program 79
3. Variabel Lingkungan 90

VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 97
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Jumlah KPM BPNT Kota Bandar Lampung Tahun 2017 6
2. Jumlah KPM BPNT Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung 2017 7
3. Laporan Permasalahan Penyaluran BPNT Juli 2018 di Rajabasa Jaya 8
4. Penelitian Terdahulu 9
5. Daftar Informan Penelitian..... 52
6. Dokumen Terkait Implementasi Program BPNT 54
7. Triangulasi Metode Penelitian 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Tahap-tahap Kebijakan Publik 14
2. Proses Implementasi Kebijakan 16
3. Kerangka Pikir 47
4. Struktur Birokrasi Kelurahan Rajabasa Jaya 61
5. Bantuan Pangan Non Tunai 62
6. Registrasi atau Pembukaan Rekening KPM 63
7. Kondisi Rumah KPM BPNT Rajabasa Jaya 77
8. Ilustrasi Cara Pemanfaatan BPNT di Rajabasa Jaya 82
9. Bagan Pelaksanaan Registrasi 86

DAFTAR SINGKATAN

1. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai
2. E-warung : Elektronik Warung
3. KKS : Kartu Keluarga Sejahtera
4. DT-PPFM : Data Terpadu Program Penanganan Fakir
5. EDC : *Electronic Data Capture*
6. Pedum : Pedoman Umum
7. KPM : Keluarga Penerim Manfaat BPNT
8. SDM : Sumberdaya Manusia
9. LAPOR : Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
10. GPRS : General Packet Radio Services

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu Sumber Daya yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran.

Kemiskinan merupakan penyebab utama kerawanan pangan. Gambaran kemiskinan salah satunya dapat dilihat dari kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, kesehatan, dan lain-lain. Tingkat kemiskinan rumah tangga dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluarannya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah sehingga rumah tangga miskin melakukan pilihan dalam membelanjakan pendapatan nya bahkan mungkin harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu.

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program-

program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program pemerintah yang berorientasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya di sebut BPNT.

Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhuan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Adanya program Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan dapat mampu memperbaiki pelayanan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dengan tujuan penyaluran bantuan subsidi pangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung program tersebut Dinas Sosial Kota

Bandar Lampung saat ini telah mencatat ada sejumlah 71 E-Warung di Kota Bandar Lampung sebagai sarana penunjang terlaksananya Program BPNT.

Program BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme Kartu Keluarga Sejahtera yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warung yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, BTN dan Mandiri). Kota Bandar Lampung sendiri bekerja sama dengan Bank BRI.

Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Timur. Jumlah KPM yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai di Indonesia yaitu berjumlah 1,286.194 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan senilai Rp 1,7 triliun. (https://nasional.kompas, di akses pada 3 September 2018)

Pada laman (https://m.cnn.indonesia.com/ekonomi/sebaran-e-warung-tak-merata-hambat-bantuan-pangan-nontunai) mengatakan bahwa “berdasarkan catatannya, pada 2017 sebanyak 14,4 juta KPM di 470 kabupaten/kota masih menggunakan Rastra karena sebaran e-warung yang belum merata dan infrastruktur yang memadai belum ada di kota-kota kecil sehingga penerapan nya belum merata dengan sepenuhnya. Perlu dilakukan kecukupan sebaran e-warung, jaringan dan sosialisasi program juga”.

Pada pelaksanaan nya Program BPNT tersebut masih terdapat beberapa kendala. Fakta di lapangan terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang benar-benar berhak tetapi tidak menerima. Sebaliknya terdapat KPM yang tak berhak tapi kenyataannya ia menerima BPNT. Hal ini terjadi dikarenakan data KPM BPNT masih mengacu pada rujukan pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu.

Masyarakat, Lurah, Camat, Bupati dan Gubernur sekali pun tidak dapat mengganti data KPM yang ada, karena sudah merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung perlu melakukan usulan data pemanfaat BPNT yang sesuai dibantu oleh RT, Lurah/Kepala Desa agar realisasi BPNT kedepannya benar-benar tepat sasaran. Perlu dilakukan Basis Data Terpadu yang baru agar dapat mengakomodir KPM yang tepat sasaran, tolong jangan mengakomodir penerima yang didasari oleh kedekatan emosional atau ikatan saudara.

Terkait permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima BPNT, peneliti melakukan wawancara dengan Lurah setempat. Berdasarkan wawancara dengan Lurah di Rajabasa Jaya Bapak Muhammad Tarmizi ia mengatakan bahwa ia juga merasa kebingungan menjawab pertanyaan masyarakat miskin di Kelurahan nya yang tidak terakomodir atau tidak mendapat BPNT karena data-data yang merupakan penerima BPNT memang bukan kewenangan pemerintah desa, seharusnya sejak awal terdapat pendataan ulang dan komunikasi terhadap pemerintah desa dalam melakukan pendataan agar

penerima BPNT tepat sasaran. Bapak Tarmizi berkata bahwa BPNT memang kurang tepat sasaran, ada yang benar-benar miskin namun tidak tercover.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai di Lampung direalisasikan di dua kota yaitu Bandar Lampung dan Metro. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Bapak Santoso Adhy S, SE. MM menyebutkan KPM penerima BPNT di Kota Bandar Lampung sebanyak 49.711 KPM (Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 21/HUK/2017).

Berikut di bawah ini merupakan data jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Bandar Lampung :

Tabel 1. Jumlah KPM BPNT Kota Bandar Lampung Tahun 2017.

NO	KECAMATAN	JUMLAH KPM
1	BUMI WARAS	4269
2	ENGGAL	1134
3	KEDAMAIAN	2106
4	KEDATON	2017
5	KEMILING	2479
6	LABUHAN RATU	1587
7	LANGKAPURA	1456
8	PANJANG	4446
9	RAJABASA	1883
10	SUKABUMI	2763
11	SUKARAME	1148
12	TANJUNG KARANG BARAT	2559
13	TANJUNG KARANG PUSAT	2655
14	TANJUNG KARANG TIMUR	1753
15	TANJUNG SENANG	1369
16	TELUK BETUNG BARAT	3376
17	TELUK BETUNG SELATAN	3163
18	TELUK BETUNG TIMUR	3130
19	TELUK BETUNG UTARA	3806
20	WAY HALIM	2612
	JUMLAH	**49711**

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 2017

Program tersebut terealisasikan pada 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung, salah satu nya adalah Kecamatan Rajabasa. Kecamatan Rajabasa merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandar Lampung yang telah merealisasikan program bantuan pangan non tunai. Program tersebut telah berjalan di tujuh kelurahan di Kecamatan Rajabasa. Peneliti melakukan penelitian pada Kelurahan Rajabasa Jaya.

Berikut di bawah ini akan menyajikan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Rajabasa :

Tabel 2. Jumlah KPM BPNT Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2017

No	Kelurahan	Keluarga Penerima Manfaat
1.	Gedong Meneng	137
2.	Gedong Meneng Baru	43
3.	Rajabasa	590
4.	Rajabasa Jaya	563
5.	Rajabasa Nunyai	213
6.	Rajabasa Pemuka	98
7.	Rajabasa Raya	239
	Jumlah	**1883**

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2017.

Berdasarkan tabel di atas untuk Kelurahan Rajabasa Jaya sendiri terdapat 563 orang KPM BPNT. Pada pelaksanaan Program BPNT di Rajabasa Jaya fakta di lapangan terdapat masyarakat miskin yang seharusnya berhak menerima BPNT namun tidak menerima nya, hal ini dikarenakan data yang diberikan Dinas Sosial merupakan hasil Pemutakhiran Data Terpadu pada tahun 2015 namun digunakan pada tahun 2017 hingga sekarang, sehingga data tersebut sudah tidak valid dan perlu dilakukan pemutakhiran basis data terpadu yang baru dan terjadi permasalahan pada pelaksanaan BPNT yaitu mengenai permasalahan kurangnya jumlah dana BPNT untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok pangan KPM di Rajabasa Jaya dan kurangnya perencanaan yang menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Rajabasa Jaya. Berdasarkan data yang ada sejumlah 28

KPM mengalami permasalahan pemanfaatan yang mana hal itu adalah saldo bantuan kosong/ nol, dan 4 orang KPM kehilangan Kartu Keluarga Sejahtera. Berikut di bawah ini merupakan data mengenai permasalahan pemanfaatan BPNT di Kelurahan Rajabasa Jaya.

Tabel 3. Laporan Permasalahan Penyaluran BPNT Juli 2018 di Rajabasa Jaya.

No	Nama	NIK	Permasalahan Pemanfaatan	
			Saldo Nol/Kosong	Kartu Hilang
1	Rubiah	1871104204740002	√	
2	Wagini	1871104505780005	√	
3	Retno Handayani	1871104412690003	√	
4	Anjariah	1871104705840005	√	
5	Yusniar	1871104301840009	√	
6	Asniah	1871106106580001		√
7	Rismawati	1871105610730001	√	
8	Sutimi	1871105208770009	√	
9	Ginarsih	1871105103740002	√	
10	Nur Sohifah	1871104103830003	√	
11	Ida Royani	1871105708830004	√	
12	Sujarwati	1871105707760003	√	
13	Sri Wahyuni	1871107112710001	√	
14	Duriyah	1871104506460001	√	
15	Silviyani	1871106011740001	√	
16	Sadiah	1871106208830007	√	
17	Nilawati	1871106109840002	√	
18	Lidyawati	1871104506550001	√	
19	Sahriyah	1871106512750002	√	
20	Sainah	1871105505640001	√	
21	Emilia	1871105011770007	√	
22	Eka Supraptiani	1871104108880007	√	
23	Sulasmiati	1871106211700004		√
24	Pujiati	1871104512890004	√	
25	Puspita Angga Sari	1871104611960002	√	
26	Susanti	1871104909820006	√	
27	Sumiyati	1871025507740005	√	
28	Septa Piana	1871106511580001	√	
29	Yanto	1871100101740009		√
30	Musinah	1871106511580001	√	
31	Partini	1871104903760003		√
32	Nani Winingsih	1871106008850002	√	

Sumber : Pendamping BPNT Kelurahan Rajabasa Jaya, 2018.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi pada Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Rajabasa Jaya Kota Bandar Lampung. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Elektronik Warung (Studi Pada Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung)".

Berdasarkan penelitian yang telah dikaji sebelumnya, maka dapat dibuat tabel tentang kajian terdahulu mengenai Bantuan Pangan Non Tunai untuk melihat relevansi dengan penelitian ini. Berikut di bawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu :

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Jenis	Judul Penelitian
1.	Afriyani (2018)	Jurnal	Pelaksanaan Pilot Project Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kota Padang
2.	Benny Rachman, Adang Agustian & Wahyudi (2018)	Jurnal	Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan BPNT
3.	Mayang Shahira Junaidi (2017)	Jurnal	The Satisfaction Comparison Of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients And Rastra Recipients In Cakung District, East Jakarta
4.	Ika Surya Kharismawati (2017)	Jurnal	Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warung (Studi Pada Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya)
5.	Handika Yogasulistyo (2017)	Jurnal	Efektivitas E-Warung KUBE Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dalam Mengoptimalkan Penerimaan BPNT di Kota Yogyakarta.

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Peneliti pertama mengkaji tentang pelaksanaan Pilot Project Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Padang. Penelitian kedua mengkaji

tentang efektivitas dan perspektif pelaksanaan Rastra dan BPNT. Penelitian ketiga ini yang membedakan adalah dalam penelitian ini mengkaji tentang Menganalisis tingkat kepuasan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan penerima Beras Sejahtera (RASTRA) di Kabupaten Cakung, Jakarta Timur. Penelitian keempat yang membedakan ialah teori yang digunakan dan penelitian terakhir adalah mengenai efektivitas e-warung PKH dalam mengiotimalkan Penerimaan BPNT di Kota Yogyakarta.

Peneliti saat ini mengkaji implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui elektronik warung di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan menggunakan indikator teori implementasi Mazmanian dan Paul Sabatier.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu "Bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui elektronik warung di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui elektronik warung di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan tentang kebijakan, khususnya mengenai implementasi kebijakan program bantuan pemerintah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta sebagai sumber informasi awal bagi peneliti-peneliti yang tertarik pada implementasi kebijakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Secara umum, istilah kebijakan publik atau *public policy* dimaknai sebagai perilaku seorang aktor (pejabat, suatu kelompok, atau suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Untuk dapat memahami lebih dalam, berikut beberapa pendapat ahli tentang konsep kebijakan publik.

Pendapat pertama, William N. Dunn (2003:132) Kebijakan Publik (*Public Policy)* merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan-badan pemerintah atau instansi-instansi pemerintah.

Pendapat kedua, Laswell (dalam Nugroho, 2009:85) Kebijakan publik secara sederhana dimaknai sebagai keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Pendapat ketiga, Nugroho (2009: 51-52) Kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Bahkan kebijakan publik adalah hasil sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial dan kultural tempat kebijakan itu sendiri berada. Kebijakan publik merupakan bentuk dinamika tiga dimensi kehidupan setiap Negara bangsa yaitu dimensi politik, dimensi hukum dan dimensi manajemen.

Berdasarkan uraian pendapat pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kebijakan publik dalam penelitian ini adalah: serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Negara yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh Negara dalam rangka memecahkan masalah tertentu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan penjelasan tersebut, merupakan kebijakan publik dalam rangka program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan ini, bukan termasuk proses akhir dari suatu kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Setiap proses terdapat tahap-tahap kebijakan publik.

Berikut di bawah ini merupakan bagan proses tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003:25)

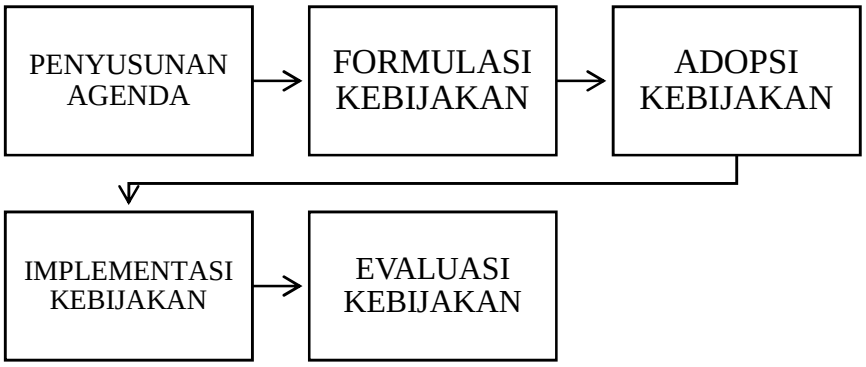

Gambar 1. Tahap-tahap kebijakan publik

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Implementasi Kebijakan

Suharto (2014:79) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan pada intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan.

Kesimpulannya menurut Suharto, sebuah kebijakan dalam proses perencanaannya harus menuju perubahan yang lebih transparan, tidak abstrak dan dalam penerapan sebuah kebijakan merupakan sebuah tujuan, sedangkan alat untuk mencapai tujuan adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai kebijakan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam (Wahab 2008:65) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus

perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan mencapainya serta memelukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Alur kegiatan tersebut mencakup; Pertama, persiapan seperangkat aturan yang lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2001:192) Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan- tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai

perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik yang dimaksud adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan operasional, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Purwanto (2012:72) menjelaskan tentang proses implementasi kebijakan publik. Berikut di bawah ini pendapat Purwanto mengenai proses implementasi kebijakan publik.

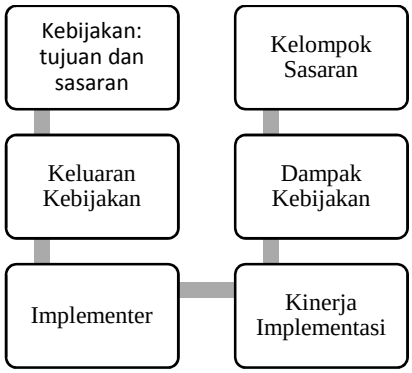

Gambar 2. Proses Implementasi Kebijakan

2. Model Teori Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan yang semakin kompleks. Untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Sebenarnya terdapat macam model-model yang diajukan oleh para ahli namun disini hanya dijelaskan sedikit tentang model-model yang cenderung baru dan banyak mempengaruhi berbagai pikiran dan tulisan para ahli. Model-model tersebut antara lain

1. **Model Teori Implementasi A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

   Model kerangka analisis implementasi (a framework for implementation analysis) yang di perkenalkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2010: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi sesuatu keberhasilan implementasi, yaitu:

   1) Karakteristik Masalah

   Masalah publik (dalam Subarsono, 2010: 95) memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

   2) Karakteristik Program/Kebijakan

   Kebijakan publik (dalam Subarsono,2010:97) memiliki beberapa karakteristik yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3) Variabel Lingkungan

Lingkungan kebijakan publik (dalam Subarsono, 2010: 98) memiliki beberapa karakteristik yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilik dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

2. Model Teori Implementasi menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model ini sering disebut sebagai Model Implementasi Kebijaksanaan. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (Performance). Kedua ahli tersebut mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan prestasi kerja dipisahkan oleh jumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan dalam Wahab (2016:165-166). Variabel-variabel tersebut adalah:

a. Standar dan tujuan kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan. Kebijakan secara menyeluruh, di samping

itu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah.

b. Sumber-sumber kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Karakteristik atau sifat badan/instansi pelaksana.

c. Komunikasi antara organisasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan sasaran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan sasaran dan tujuan tersebut.

d. Karakteristik agen pelaksana.

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka pembahasan ini tidak dapat lepas dari struktur birokrasi yang mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

e. Disposisi/sikap pelaksana.

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan terhadap tiga macam elemen yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan para pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karaktersitik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

3. Model Teori Implementasi Edward III

Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration (administrasi publik) dan public policy (kebijakan publik). Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Edwards ada 4(empat) faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik untuk menilai apakah kebijakan itu berhasil atau gagal (Winarno,2008:174), yaitu: komunikasi, sumber

daya, disposisi atau kecenderungan, dan yang terakhir struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomuniksikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (Widodo, 2009:97).

b. Sumber Daya (Resources)

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif (Nugroho, 2008: 447) Sumber daya yang penting menurut Edwards III (Winarno, 2008: 181) meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas- tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi, salah satunya

disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan staf atau implementator saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Selanjutnya adalah fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Edwards III (Widodo, 2009:104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku

kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diingini oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma, serta pola-pola hubungan yang terjadi berulangkali dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan suatu kebijakan.

Menurut Edwards III (Winarno, 2008: 203) ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu, prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Bagian pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Bagian kedua, berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat

kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu program terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang mempengaruhinya baik secara internal maupun eksternal.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier karena dengan menggunakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, maka akan menjawab tujuan penelitian ini, yaitu pertama mendeskripsikan implementasi program BPNT melalui e-warung pada Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

C. Tinjauan Tentang Program

Menurut Darwanto S. S (1992:19) program merupakan suatu tampilan yang dibuat dalam suatu acara agar acara tersebut dapat menarik para pendengar, sedangkan menurut Sumar (dalam Saleha, 2005:26) program didefinisikan sebagai usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan pada meningkatnya pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang

terartur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi atas proyek-proyek pembangunan.

Menurut Yulikuspartono (2009:29) Program yaitu merupakan sederetan instruksi atau berupa statement dalam bahasa yang dimengerti oleh computer yang bersangkutan, sedangkan menurut pendapat Sukrisno program adalah kata, ekspresi atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemprograman.

D. Tinjauan Tentang Bantuan Pangan Non Tunai

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai, disingkat BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerja sama dengan Bank Penyalur (Pedoman Umum BPNT, 2018:3).

(Kemensos, 2017:9) Bantuan sosial pangan non tunai dilakukan dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp 110.000,- per bulan bagi penerima program melalui sebuah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS merupakan instrumen penyaluran yang dapat dibelanjakan barang-barang sembako seperti beras dan/ telur sesuai kebutuhan di E-Warung, bantuan dapat disisakan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan.

Menurut buku pedoman BPNT (2018:4), dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.

2. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

Adanya program ini yaitu diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan kebutuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). (Pedoman Umum BPNT, 2018:10)

Adapun berbagai manfaat yang dirasakan Keluarga Penerima Manfaat :

1. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
3. Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Non Tunai (GNNT)
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

E. Tinjauan Tentang Elektronik Warung (e-warung)

1. Pengertian Elektronik Warung (e-warung)

Elektronik Warung yang selanjutnya disebut dengan e-warung adalah sarana usaha yang didirikan oleh Kementrian Sosial dan sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, untuk dapat meningkatkan pelayanan dari segi kualitas, maupun kuantitas bantuan sosial. E-warung merupakan tempat transaksi penyaluran BPNT dan dapat dikatakan sebagai operasional Program BPNT.

Operasional Program BPNT yaitu e-warung merupakan tempat penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan sistem perbankan. Dalam hal ini masyarakat penerima bantuan diberikan bantuan secara non tunai dengan cara mengirim dana

bantuan ke masing-masing rekening KPM yang telah disediakan oleh bank terkait. Selanjutnya penerima manfaat dapat membelanjakan dana BPNT pada e-warung terdekat di lokasi tempat tinggalnya.

2. Fungsi E-Warung

Untuk mengetahui fungsi dari diterapkannya e-warung adalah sebagai berikut:

1. Tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga. E-warung menjual bahan pangan murah berkualitas yang disuplai dari Bulog/supplier pedagang bahan pangan atau pedagang grosir. Hal ini, karena Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah memberikan himbauan kepada pengelola e-warung untuk menjual bahan pangan murah dan dapat dijangkau oleh seluruh peserta KPM.
2. Tempat transaksi non tunai dan menyediakan bahan pokok pangan/sembako dengan harga yang lebih murah.

Menurut Handika Yogasulistyo (2017:47-49) berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa e-warung adalah operasional program yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial, sebagai upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan sosial, khususnya program BPNT setiap bulannya. Fungsi dari diterapkannya e-warung yaitu sebagai tempat penjualan bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga, menjadi agen penyalur bantuan sosial non tunai bagi peserta keluarga penerima manfaat (KPM).

F. Tinjauan Tentang Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum. Hal tersebut berhubungan erat dengan kualitas hidup. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Menurut Criswardani Suryawati (2005:180) Kemiskinan sebagai keadaan dimana terjadi kekurangan hal – hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan seringkali berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya sebagai segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dan Kerentanan Pangan di Indonesia merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dari waktu ke waktu.

Salah satu pakar ahli Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami

seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Ketidakmampuan ini disebabkan pendapatan yang rendah. Untuk itu, pendapatan menjadi indikator kemiskinan.

Salah satu indikator kemiskinan menurut BPS yaitu adalah hanya mengkonsumsi daging, susu atau ayam satu kali dalam seminggu serta hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari, dengan kata lain salah satu indikator kemiskinan menurut BPS adalah kekurangan pangan.

2. Ukuran Kemiskinan

Standar untuk menyatakan seseorang termasuk kelompok miskin bermacam-macam dan juga sering diperdebatkan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional, budaya dan politik. Beberapa garis batas kemisinan yang sering digunakan antara lain

a. Ukuran dari Sayogyo

Sayogyo memberikan batas garis kemiskinan untuk masyarakat pedesaan setara dengan 20 kg beras per kapita per tahun. Untuk kategori penduduk miskin adalah pengeluaran per kapita per tahun kurang dari 320 kg beras untuk penduduk pedesaan dan 480 kg untuk penduduk perkotaan. Sedangkan yang kurang dari 180 kg untuk

pedesaan dan 270 kg beras untuk perkotaan dijadikan batas kelompok penduduk paling miskin.

b. Ukuran dari BPS

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

1) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
2) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

c. Ukuran Sam F. Poli

Sam poli menyatakan bahwa batas garis kemiskinan di Indonesia bagi masyarakat pedesaan adalah sama dengan 27 kg beras per kapita per bulan dan untuk masyarakat perkotaan sama dengan 40 kg beras per kapita per bulan. Ukuran Sam F. Poli ini lebih tinggi dari ukuran yang diusulkan oleh Sayogyo.

d. Ukuran Bank Dunia

Bank dunia menetapkan ukuran garis kemiskinan untuk Indonesia berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional termasuk dalam kategori miskin. Secara umum Bank Dunia menetapkan garis batas kemiskinan sebesar US$ 1 per hari bagi Negara-negara berkembang dan US$ 2 bagi Negara-negara maju.

Sementara itu menurut ahli ekonomi islam berpendapat bahwa garis batas nishab dapat dijadikan sebagai ukuran yang membedakan penduduk kaya dan miskin. Islam memberikan batasan yang cukup jelas antara orang yang mampu (wajib zakat) dengan orang yang miskin (penerima zakat). Batasan wajib mengeluarkan zakat adalah penghasilan yang telah lebih dari satu nisab atau setara dengan 94 gram emas murni dalam jangka waktu setahun.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan menurut para Ahli.

Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yaitu:

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah

   Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja

   Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3. Keterbatasan Sumber Alam

   Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

   Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5. Keterbatasan Modal

   Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan

keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6. Beban Keluarga

   Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningakatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

G. Tinjauan Tentang Manajemen

1. Definisi Manajemen

Dalam suatu program diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan program hingga tercapainya tujuan dari program tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu management berasal dari kata manage menurut kamus oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata manage memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti mengutip definisi manajemen menurut beberapa ahli. Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

G.R Terry (Hasibuan,2009:2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (dalam Safroni,2012:44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota pelaksana program dan proses penggunaan semua sumber daya untuk tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan program yang telah ditentukan.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen (Management Functions)

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli. Menurut George R. Terry (Hasibuan,2009:38) fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (actuating) dan Pengendalian (controlling). Menurut Henry Fayol (Safroni,2012:47), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan, Pengkoordinasian (coordinating), Pengendalian (controlling)

Sedangkan menurut Ricki W. Griffin (Ladzi Safroni,2012:47) fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (planning and decision making), pengorganisasian (organizing), Pengarahan (leading) serta pengendalian (controlling). Dari perbandingan beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (Planning) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (organizing). Hampir semua ahli menempatkan pengorganisasian diposisi kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian merupakan pembagian kerja dan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Selanjutnya setelah menerapkan fungsi perencanaan dan pengorganisasian adalah menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan

dalam kata yang berbeda-beda seperti actuating, leading, dan commanding, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Tetapi juga ada penambahan fungsi pengkoordinasian (coordinating) setelah fungsi pengarahan. Fungsi pengkoordinasian untuk mengatur karyawan agar dapat saling bekerjasama sehingga terhindar dari kekacauan, percekcokan dan kekosongan pekerjaan. Selanjutnya fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian *(controlling).*

Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut ahli Henry Fayol adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan *(planning)*

Perencanaan (*planning)* adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini dinamis artinya dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi, sedangkan hasil dari perencanaan akan diketahui pada masa depan.

Tentunya setiap organisasi maupun instansi melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, demikian juga dengan dinas-dinas yang terkait dalam penyelenggaraan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Rajabasa Jaya Kota Bandar Lampung. Untuk

mengetahui lebih jauh mengenai perencanaan, maka perlu memahami definisi perencanaan menurut beberapa ahli manajemen.

Menurut Henry Fayol (dalam Tanjung,1999:76) perencanaan berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan organisasi mampu mencapai suatu tujuan dan juga menyangkut tentang upaya yang dilakukan untuk mengantisispasi kecenderungan di masa-masa yang akan datang dan penentuan sebuah strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan target tujuan suatu organisasi.

Definisi perencanaan lainnya yaitu, menurut Louis A. Allen (dalam Hasibuan, 2009:92) perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut ahli manajemen, Harold Koontz dan Cyril O' Donnel (dalam Sukarna,2011:11) perencanaan adalah fungsi daripada manajer di dalam pemilihan alternatif-alternatif, tujuan-tujuan kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program. Menurut Koontz O' Donnell (Ranupandojo, 1996:17) menjelaskan bahwa tipe-tipe perencanaan dapat dibedakan menjadi tujuan, kebijakan, prosedur, peraturan-peraturan, anggaran, program dan strategi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai perencanaan maka peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses pemikiran dalam memilih dan menentukan program apa yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2) Pengorganisasian *(organizing)*

Fungsi pengorganisasian yang dalam bahasa inggrisnya adalah organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Penggorganisasian tentu berbeda dengan organisasi. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis.

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan. Untuk memahami pengorganisasian secara mendalam, maka perlu mengetahui arti pengorganisasian menurut beberapa ahli.

Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009:119) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang- orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisisen dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Menurut Kontz dan O’Donnel (dalam Malayu Hasibuan, 2009:119), menurut mereka fungsi pengorganisasian manajer meliputi penentuan penggolongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan perusahaan, pengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam suatu

bagian yang dipimpin oleh seorang manajer, serta melimpahkan wewenang untuk melaksanakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai definisi pengorganisasian menurut beberapa ahli, peneliti setuju dengan pendapat para ahli bahwa pengorganisasian pun perlu adanya perencanaan yang dilakukan oleh manajer sebelum menetapkan kegiatan apa yang harus dilakukan, pembagian kerja pada setiap pelaksana, serta penggolongan kegiatan-kegiatan agar proses manajemen berjalan efisen, selaras dan tepat sasaran. Dengan demikian, peneliti menarik kesimpulan dari definisi pengorganisasian adalah suatu proses pengelompokkan dan pembagian pekerjaan, penentuan kegiatan apa yang akan dilakukan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

3) Pengarahan (*commanding)*

Fungsi pengarahan *(commanding)* merupakan fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Namun, penerapan fungsi ini sangat sulit dan kompleks karena keinginan karyawan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita dan lain-lainnya. Prinsip-prinsip pengarahan (dalam Syamsi, 1994:124) ditujukan pada keterpaduan antara tujuan perorangan dan tujuan organisasinya, keterpaduan antara tujuan kelompok dan tujuan

organisasinya, kerjasama antar pimpinan, partisispasi dalam pembuatan keputusan, terjalinnya komunikasi yang efektif dan pengawasan yang efektif dan efisien.

Definisi fungsi pengarahan secara sederhana (Handoko, 2001:25) adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan. Menurut Henry Fayol (dalam Tanjung, 1999:81) mengemukakan bahwa pengarahan dilakukan untuk memberikan arahan kepada Sumber Daya Manusia sebagai pegawai di dalam suatu organisasi atau perusahaan agar pegawai tersebut mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009 :183) pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan di dalam suatu organisasi atau instansi untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksananakan suatu kegiatan program/usaha.

4) Pengendalian *(Controlling)*

Fungsi pengendalian *(controlling)* adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan

sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
c) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
d) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Pemahaman mengenai fungsi pengendalian dikemukakan oleh beberapa ahli. Seperti menurut George R. Terry dalam *Principles of Management* mengemukakan pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan jika perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Menurut Harold Koontz (dalam Hasibuan, 2009:241-242) pengendalian artinya pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Sedangkan Earl P. Strong (dalam Hasibuan, 2009:241) mengatakan bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan rencana.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula agar rencana dapat terselenggara dengan baik.

H. Tinjauan Tentang Interaksi Sosial

1. Pengertian Interaksi Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling mengadakan hubungan dengan individu lain dalam kehidupannya, sejak ia membentuk pribadinya. Karena itu individu tidak dapat hidup tanpa individu lain di tengah kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan individu perlu berinteraksi dengan individu lain. Interaksi tersebut dapat diartikan sebagai interaksi sosial.

Menurut Bonner (dalam Gerungan, 2004) interaksi sosial diartikan suatu interaksi antara dua atau lebih individu, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Interaksi sosial ditinjau dari sudut psikologis menurut Newcomb (dalam Santoso,2010) mendefinisikan, interaksi sosial adalah peristiwa yang kompleks, termasuk tingkah laku yang berupa rangsangan dan reaksi keduanya, dan yang mungkin mempunyai satu arti sebagai rangsangan dan yang lain sebagai reaksi.

Individu melakukan interaksi sosial dengan individu lain tidak hanya dikarenakan individu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang

lain melainkan interaksi sosial merupakan salah satu kebutuhan dasar. Menurut Schutz (dalam Sarwono, 2004) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang mengorientasikan dirinya kepada orang lain dengan cara tertentu dan cara ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilakunya dalam hubungan dengan orang lain. Selain itu, Schutz dalam teori FIRO (*Fundamental Interpersonal Relation Orientation*) juga menjelaskan bahwa kebutuhan dasar individu dalam hubungan antara individu dengan individu lainnya terdiri dari tiga kebutuhan dasar yaitu, inklusi, kontrol dan afeksi.

- Inklusi, yaitu kebutuhan untuk terlibat dan termasuk dalam kelompok.
- Kontrol, yaitu arahan dan pedoman dalam berperilaku
- Afeksi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian dalam kelompok.

Inklusi merupakan kebutuhan individu untuk terlibat dan masuk dalam kelompok. Maksud individu terlibat dalam kelompok adalah dalam tahap ini, individu mulai berpartisipasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Remaja yang dalam pemenuhan kebutuhan inklusinya terpenuhi akan mudah untuk menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungan dan kondisi dimana ia berada dan individu mampu bekerja sama dengan orang lain. Namun individu yang tidak terpenuhi kebutuhan inklusinya maka individu cenderung berperilaku malu, menarik diri, sulit menyesuiakan diri dan sulit bekerja sama dengan orang lain.

Kontrol merupakan arahan dan pedoman dalam berperilaku. Tidak semua individu memiliki kemandirian dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya karena itu individu juga masih membutuhkan dorongan dan arahan dari orang lain. Dengan adanya arahan dan dorongan orang lain dapat dijadikan sebagai pertimbangan individu dalam memutuskan suatu persoalan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya dimana interaksi tersebut dinyatakan dalam bentuk tingkah laku. Interaksi sosial merupakan interaksi dimana individu membutuhkan individu lainnya sekalipun interaksi antara individu terhadap lingkungan sekitarnya. Interaksi sosial dimulai dari tingkat yang sederhana dan terbatas, yang didasari oleh kebutuhan sederhana.

Lebih lanjut Hurlock (1988) merumuskan orang yang berciri-ciri memiliki interaksi sosial yang tinggi adalah sebagai berikut: mampu dan bersedia menerima tanggung jawab, berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan program, segera menyelesaikan masalah yang menuntut penyelesaian, dan senang menyelesaikan dan mengatasi berbagai hambatan.

Melihat pernyataan Hurlock tersebut, maka individu yang memiliki interaksi sosial yang tinggi adalah individu yang mampu menyeimbangankan perilaku yang dilakukannya dengan tuntutan atau pedoman yang berlaku di linggkungannya. Namun dalam hal ini, tidak semua individu mampu berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Tinggi

dan rendahnya individu dapat berinteraksi sosial sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

2. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Menurut Soekanto (2007) suatu interaksi sosial tidak mungkin akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:

a. adanya kontak sosial
b. adanya komunikasi.

Kontak sosial merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial. Kata kontak berasal dari kata con atau cum yang artinya bersama-sama dan tango yang artinya menyentuh. Jadi kontak sosial dapat diartikan bersama-sama menyentuh. Dengan kata lain kontak sosial terjadi karena adanya stimulus yang diberikan seseorang dan menghasilkan respon dari orang lain. Kontak sosial dapat dikatakan sebagai tahap awal pada terjadinya interaksi sosial.

Selain adanya kontak sosial syarat terpenting terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi. Komunikasi merupakan situasi dimana seseorang memberikan arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan respon terhadap terasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dengan demikian, dengan adanya komunikasi maka sikap-sikap dan perasaan suatu kelompok atau orang- perseorangan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-orang lain.

I. Kerangka Berpikir

Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir :

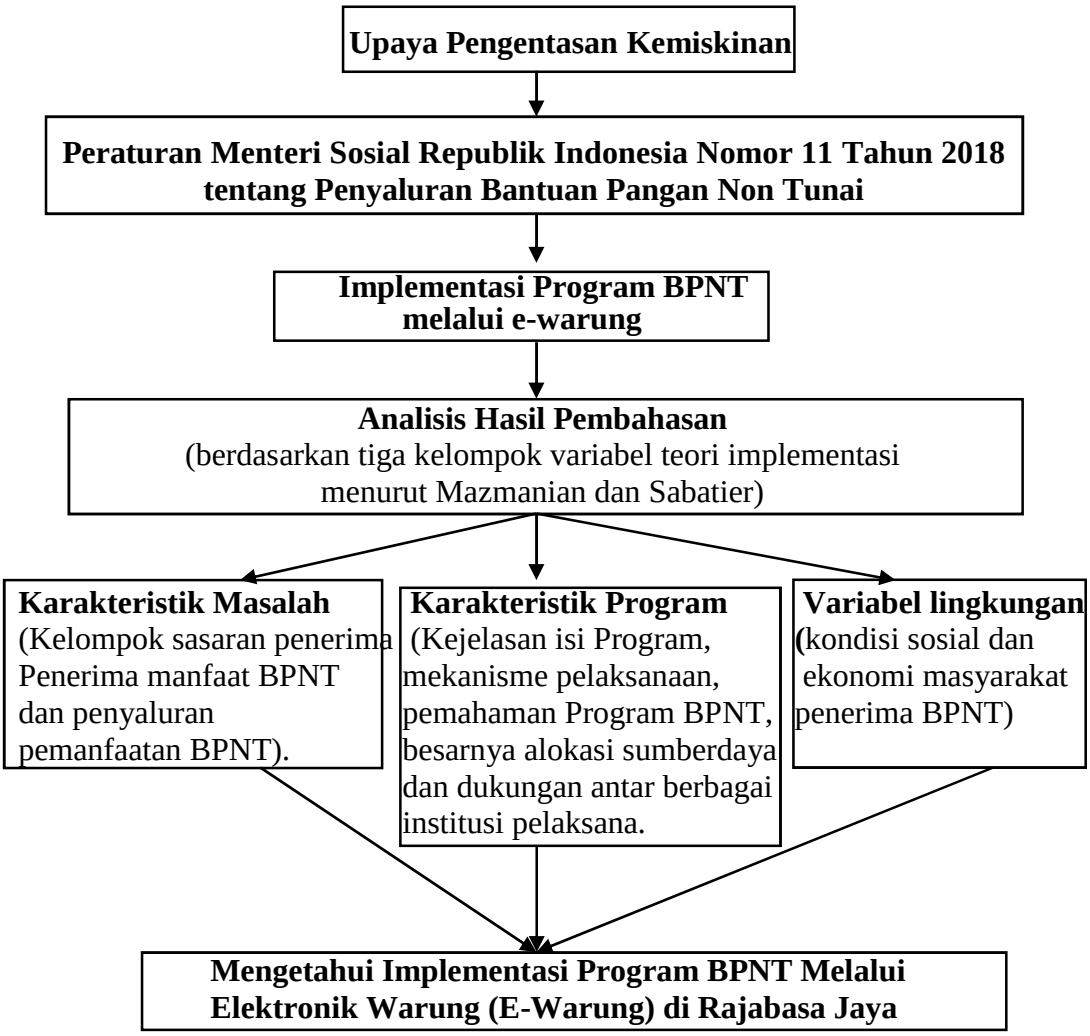

Gambar 3. Kerangka Pikir

Sumber : Diolah Peneliti, 2018.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Ronny Kountur (dalam Yogi Noviantama, 2017:36), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki, Nazir (2003:63-64).

Moleong (2009:3) Metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warung serta melihat

hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2004:97), dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian merupakan hal penting untuk membatasi masalah yang akan diteliti agar pembahasan tidak terlalu luas walaupun sifatnya masih sementara dan masih terus berkembang sewaktu penelitian.

Berdasarkan pemaparan di atas maka fokus penelitian yang digunakan untuk mengukur implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui elektronik warung di Kelurahan Rajabasa Jaya menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier.

1) Karakteristik masalah, mengenai indikator karakteristik masalah dapat dilihat dari standar dan ketepatan sasaran penerima Program BPNT serta cakupan perubahan yang terjadi setelah adanya Program.

2) Karakteristik program, dilihat dari batasan berupa pemahaman program, sumberdaya, hubungan antar instansi/organisasi dan mekanisme pelaksanaan Program BPNT.

3) Variabel lingkungan, dilihat atau diukur dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima bantuan serta tingkat kemajuan teknologi dan sikap KPM itu sendiri.

C. Lokasi Penelitian

Moloeng (2004: 86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara baik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti biaya, waktu dan tenaga juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rajabasa Jaya dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data merupakan benda atau hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Dalam mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

   Dalam peneleitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Informan-informan berasal dari unsur pelaksana kebijakan serta beberapa orang yang berkaitan langsung dengan program bantuan pangan non tunai. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama dalam kegiatan analisis data.

2. Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa:

   a. SK Menteri Sosial RI Nomor 21/HUK/2017
   b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warung.
   c. Buku Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai.
   d. Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, website, dan sebagainya.

E. Informan

Menurut Sparadley dan Faisal (dalam Yogi Noviantama, 2017:41) agar lebih terbukti perolehan informasinya, maka ia mengajukan beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan informan.

Berdasarkan kriteria tersebut, pada penelitian ini informan yang dipilih adalah mereka yang dipandang cukup untuk memahami implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Rajabasa Jaya. Dalam hal ini penentuan sumber informan dilakukan secara sengaja (*purposive)* sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Status/Jabatan
1	Santoso Adhy S, SE.MM	Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
2	Rio Dedi Allantara	Koordinator Teknis BPNT Kota Bandar Lampung
3	Ekawati Hanani	Ketua E-Warung dan merupakan KPM
4	Duwansyah Syafuan M, S.E	Pendamping BPNT Rajabasa Jaya
5	Edo Gustria, S.Pd	Pendamping BPNT Rajabasa Jaya
6	Marwiyah	KPM
7	Rubiah	KPM
8	Asmanah	KPM
9	Halimah	KPM
10	Ginarsih	KPM
11	Lamrah	KPM
12	Nurlela	KPM
13	Musinah	KPM
14	Sumini	KPM
15	Septi Maya Sari	KPM
16	Sugiyem	NON KPM
17	Desiyani Maskur	NON KPM
18	Fatimah	NON KPM
19	Endang	NON KPM
20	Lastri	NON KPM

Sumber : Diolah Peneliti 2018.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebaga berikut :

1. Wawancara

   Sofar Silaen dan Widiyono (2013:153) metode *interview* (wawancara) adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data *(interviewer)* sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan oleh informan *(interviewee)* sebagai pemberi informasi. Singkatnya wawancara dalam penelitian ini berupa tanya jawab antara peneliti dan informan mengenai implementasi bantuan pangan non tunai melalui E-Warung. Mengenai hal ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

2. Dokumentasi

   Menurut Sofar Silaen dan Widiyono (2013:163) Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu relatif belum terlalu lama. Jika peninggalan tertulis yang relatif cukup lama maka berubah menjadi bukti-bukti historis mengenai keadaan atau peristiwa masa lalu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen atau arsip yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung serta artikel atau jurnal yang memuat tentang pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, foto-foto yang digunakan untuk mengambil gambar informan dan rekaman suara melalui handphone saat melakukan wawancara.

Berikut di bawah ini merupakan tabel dokumen terkait implementasi BPNT

Tabel 6. Dokumen terkait Implementasi Program BPNT

No	Dokumentasi
1	Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017
2	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penyaluran bantuan sosial pangan
3	SK Menteri Sosial RI Nomor 21/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah KPM Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2017

Sumber : Diolah peneliti 2018.

3. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2015:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan (tanpa ditentukan). Adapun terkait hal observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung mengenai kondisi KPM dan fasilitas program yang ada seperti E-Warung dan mesin EDC.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Effendi, Masri dan Singarimbum (1995:240) terdiri dari:

1. Editing, adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi data, pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupul tabel selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penelitian juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:337) mengemukakan bahwa aktiviitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis data ini meliputi tiga komponen analisis yaitu:

1. Reduksi Data

   Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari data-data tertulis di lapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang digunakan dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan terhadap suatu pola yang lebih luas.

   Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai implementasi BPNT yang tidak mengacu pada indikator implementasi menurut Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

2. Penyajian Data (Display)

   Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi teroganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan dapat melanjutkan kepada perencanaan kerja selanjutnya. Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah: Implementasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai melalui e-warung di Kelurahan Rajabasa Jaya.

I. Teknik Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (dalam Yogi Noviantama, 2017:47) dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa keabsahan penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu.

Menurut Denzin (dalam Moleong, 2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Untuk memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kelurahan Rajabasa Jaya adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Kelurahan Rajabasa Jaya memiliki Luas 430Ha dan terdiri dari dua (2) Lingkungan :

1. Lngkungan I (Kampung Sukajaya dan Kampung Sumberejo)
2. Lingkungan II (Kampung Lingsuh, Kampung Bayur dan Kampung Sinar Harapan)

Kelurahan Rajabasa Jaya memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Fajar Baru

Sebelah Selatan : Kelurahan Rajabasa Raya

Sebelah Barat : Sungai Way Kandis

Sebelah Timur : Kelurahan Labuhan Dalam

Kondisi geografis di Kelurahan Rajabasa Jaya :

Ketinggian tanah dari permukaan laut : 300-500m

Tingginya curah hujan : 1000-2000 mm/tahun

Topografi (dataran rendah, tinggi, dll) : Dataran rendah

Suhu udara rata-rata : 22 -35

Orbitasi (jarak dari pusat Pemerintahan Kelurahan) sebagai berikut :

Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 Km

Jarak dari Ibukota Kota Bandar Lampung : 12 Km

Jarak dari Ibukota Provinsi : 14 Km

Jarak dari Ibukota Negara : 250 Km

B. Sejarah Singkat Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung

Sebelum terbentuknya Kelurahan Rajabasa Jaya, wilayah Kampung Sukajaya, Sumberejo, Lingsuh, Bayur dan Kampung Sinar Harapan merupakan bagian dari Kelurahan Rajabasa Kecamatan Kedaton yakni :

1. Lingkungan IV (Kampung Sukajaya dan Kampung Sumberejo)
2. Lingkungan V (Kampung Lingsuh, Kampung Bayur dan Kampung Sinar Harapan)

Sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001, tentang penghapusan, pembentukan, dan penggabungan kecamatan serta kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, maka terbentuklah Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa yang dipimpin oleh seorang Lurah (M. Helmi, SH).

1. Data Penduduk Kelurahan Rajabasa Jaya

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin :

a. Jumlah Kepala Keluarga : 1981 KK

b. Jumlah Penduduk : 7958 Jiwa

1. Laki-laki : 4141 Jiwa

2. Perempuan : 3817 Jiwa

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia :

a. 0 – 1 Tahun : 80 Jiwa

b. >1 - <5 Tahun : 171 Jiwa

c. >5 - <7 Tahun : 135 Jiwa

d. >7 - >15 Tahun : 702 Jiwa

e. >15 - <56 Tahun: 3965 Jiwa

f. >56 Tahun : 237 Jiwa

2. Sarana dan Prasarana

Pendidikan :

a. Jumlah SLTA : 2 buah

b. Jumlah SLTP : 1 buah

c. Jumlah SD : 4 buah

d. Jumlah TK : 1 buah

e. Lembaga Kursus : 2 buah

Bangunan Keagamaan :

a. Masjid : 12 buah

b. Mushola : 8 buah

3. Struktur Pemerintahan

Struktur Kelurahan Rajabasa Jaya pada tahun 2018 terdiri dari :

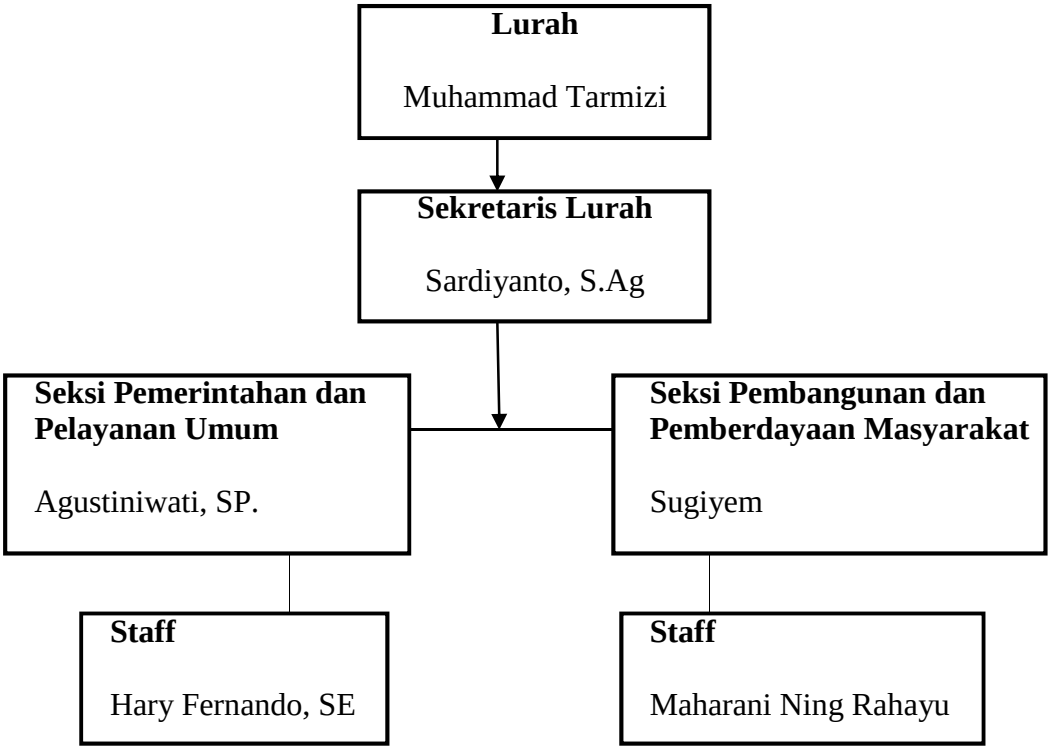

Gambar 4. Struktur Birokrasi Kelurahan Rajabasa Jaya

Sumber: Monografi Kelurahan Rajabasa Jaya

C. Gambaran Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai

Presiden Republik Indonesia dalam hal ini melalui Kementrian Sosial melakukan upaya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden RI memberikan arahan agar bantuan subsidi dan sosial dilakukan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Disahkannya Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai merupakan wujud dari kepedulian negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Berikut di bawah ini merupakan penjelasan mengenai Bantuan Pangan Non Tunai :

Gambar 5. Bantuan Pangan Non Tunai

Sumber : Kementrian Sosial RI

Berdasarkan Permensos Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 3 mengatakan bahwa BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

a. Tersambung dengan jaringan internet

b. Terdapat e-warung

Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan:

a. Registrasi atau pembukaan rekening

b. Edukasi dan sosialisasi

c. Penyaluran

d. Pembelian barang

1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening

Registrasi dilakukan oleh Bank Penyalur didampingi Pemerintah Kab/Kota serta Perangkat desa/kelurahan di tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Gambaran proses registrasi dapat dilihat pada bagan berikut ini :

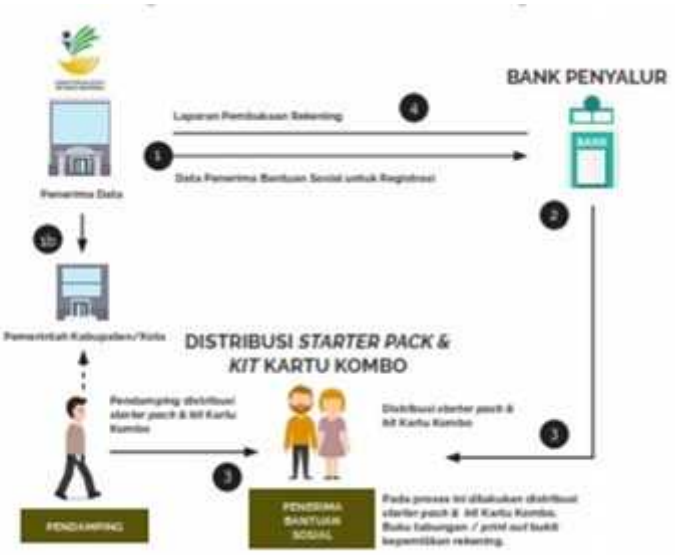

Gambar 6. Registrasi atau Pembukaan Rekening KPM

Sumber : Pedoman Umum BPNT, 2017.

2) Edukasi dan Sosialisasi

Materi pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT setidaknya mencakup:

a. Kebijakan Program BPNT

b. Prinsip-prinsip umum Program BPNT

c. Tujuan dan mekanisme pemanfaatan BPNT

d. Proses registrasi dan pemenuhan

e. Produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening bantuan sosial

f. Penggunaan manfaat BPNT

g. Tata cara pengaduan

h. Manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga

3) Penyaluran

Proses penyaluran bantuan, terdiri dari :

a. Bank penyalur membukakan rekening KKS untuk masing-masing KPM berdasarkan data yang diterima.
b. Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial. Rekening tersebut dapat diakses melalui KKS
c. Bendahara umum negara melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara kepada rekening Kementrian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementrian Sosial
d. Bank penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementrian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali
e. Bank penyalur memberikan informasi kepada pemerintah kota mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM
f. Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25
g. Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah

4) Pembelian Bahan Pangan oleh KPM pada E-Warung

a. Pembelian bahan pangan dilakukan pada E-Warung yang sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur di wilayah KPM
b. KPM mendatangi E-Warung untuk membeli bahan pangan dengan memanfaatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
c. KPM berhak memilih E-Warung yang dikehendaki atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara salah satu nya adalah Bank BRI, untuk mencairkan bantuan tanpa ada paksaan dari pihak manapun
d. KPM dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan sosial pangan yang diterimanya
e. KPM dapat mencari agen lain yang menjual barang dengan harga murah dan dapat menyampaikan keluhan ke perangkat kelurahan atau pendamping saat ada kenaikan harga yang tidak wajar.

D. Elektronik Warung

Progran Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan dengan sistem penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai baru-baru ini sedang menjadi topik perbincangan. E-warung merupakan operasional program bantuan sosial untuk masyarakat yang merupakan tindak lanjut dari upaya mengentaskan kemiskinan melalui sinergi Program BPNT. E-warung ini secara khusus diluncurkan untuk mencegah distribusi bantuan pemerintah yang tidak tepat kualitas, kuantitas dan sasaran.

E-warung ini akan menjadi sarana masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan pemerintah dengan kualitas dan mutu yang lebih baik dari

sebelumnya. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden yang menginginkan perbaikan program pemberian beras masyarakat miskin (raskin) pada Tahun 2016 dengan kualitas yang lebih baik dan harga terjangkau. Oleh karena itu, Kementerian Sosial meluncurkan operasional program e-warung yang akan menjadi agen pembayaran keuangan sekaligus perpanjangan tangan dari perbankan serta penyedia bahan pangan yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog dan supplier bahan pangan lain bagi penerima manfaat program bantuan pangan, sehingga penerima manfaat tidak lagi menjadi penonton dalam bantuan sosial, tetapi berperan aktif dalam pengelolaan bantuan sosial itu sendiri.

Kota Bandar Lampung sendiri tercatat memiliki 71 sebaran e-warung, untuk Kecamatan Rajabasa sendiri hanya memiliki tiga e-warung yaitu terdapat di Kelurahan Rajabasa Jaya, Rajabasa Nunyai dan Kelurahan Rajabasa padahal Kelurahan yang ada di Kecamatan Rajabasa ada tujuh (7). Hal ini membuktikan bahwa sebaran e-warung belum merata, diharapkan di tahun yang akan datang pemerintah dapat menambah sebaran e-warung di setiap kelurahan yang ada agar implementasi dapat berjalan dengan maksimal.

E-warung Kelurahan Rajabasa Jaya di berikan nama E-Warung SEPAKAT JAYA yang beralamat di Jalan Padat Karya Gg. Sepakat LK II RT 05, di ketuai oleh Ibu Ekawati Hanani.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Elektronik Warung di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Paul Sabatier yaitu disimpulkan bahwa :

1. Karakteristik Masalah: karakteristik masalah dalam pelaksanaan Program BPNT melalui e-warung di Kelurahan Rajabasa Jaya adalah terdapat kendala saldo KPM BPNT terlambat masuk serta jumlah bantuan dana BPNT masih sangat kurang untuk pemenuhan sebagian kebutuhan pangan para KPM BPNT di Rajabasa Jaya dan tidak tepat sasaran penerima BPNT terdapat non KPM BPNT miskin yang tidak mendapat Bantuan Pangan Non Tunai padahal ia benar-benar membutuhkan bantuan

2. Karakteristik Program dalam pelaksanaan Program BPNT dinilai masih kurang dalam menentukan penerima Program BPNT, mekanisme pelaksanaan belum terlaksana dengan baik. Kurangnya koordinasi oleh pemerintah pusat kepada RT dan RW setempat serta Aparatur

Kelurahan/Desa dalam melakukan pendataan penerima bantuan sehingga menyebabkan BPNT tidak tepat sasaran dan penyaluran BPNT mengalami kendala keterlambatan masuknya saldo bantuan dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pendamping pada saat penyaluran serta kurangnya pemahaman KPM dalam Program BPNT ini dikarenakan kurang nya sosialisasi yang diberikan.

3. Variabel Lingkungan. Kesimpulan nya untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam Program BPNT sudah mendukung dalam pelaksanaannya. Namun untuk meningkatkan pelaksanaan Program BPNT dari variabel lingkungan juga perlu dilihat dari kualitas beras yang diterima KPM BPNT di Rajabasa Jaya. Hasil nya beras dalam Program BPNT dinilai belum dapat menjamin keamanan dan keberlanjutan institusi pangan di karenakan supplier beras dalam pelaksanaan Program BPNT ini berasal dari agen yang tidak resmi. Jika memang Program BPNT benar-benar menjadi program unggulan seperti yang sering disampaikan oleh pemerintah, Bulog harus dilibatkan dalam menyuplai beras kepada e-warung penyalur BPNT agar kualitas beras yang di dapat KPM BPNT memuaskan.

B. Saran

1. Pendamping Program BPNT perlu melakukan pendampingan dan pengawasan pada saat melakukan penyaluran BPNT sehingga tidak terjadi kendala saldo yang terlambat masuk.
2. Pemerintah Pusat perlu melakukan koordinasi dengan RT dan RW setempat serta Aparatur Kelurahan dalam melakukan penentuan siapa saja yang berhak menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai.
3. Pemerintah perlu menambah besaran jumlah dana BPNT yang diberikan agar dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok pangan masyarakat penerima bantuan.
4. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas beras yang disalurkan dan agar lebih baik pemerintah seharusnya bekerja sama dengan Bulog dalam menyuplai beras pada Program BPNT.

DAFTAR PUSTAKA

Darwanto, SS. 1992. *Manajemen Produksi Acara Siaran.* Japan Internasional. Goperation Agency. (JICA) Multi Media Training Centre (MMTC).

Dunn, Willam N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik.* Gadjahmada. Yogyakarta

Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif.* PPM. Jakarta.

Mazmanian, Daniel A, et.al. (1983) *Implementation and Policy.* USA: Scott, Foreman and Company

Miles, M. B, Huberman, A.M, Hubermas dan Saldana, J (1994). Qualitative data analysis, 2 nd ed.USA

Moleong, J Lexy, . 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian Ghalia.* Jakarta.

Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses. Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi.* Jakarta: Alex Media Komputindo.

Purwanto. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Ritonga, H. 2003. *Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilaya.* Makalah disampaikan pada Konsultasi Regional Produk Domestik Bruto se Provinsi Riau, di Kepri Juli 2003.

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan.* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Singarimbum, Masri dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survai.* Jakarta : Pustaka LP3ES.

Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi).* Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung : ALFABETA.

Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik.* Bandung: PT. Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparjan dan Hempri. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan.* Yogyakarta: Aditya Media.

Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.* Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis. Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu

Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat,* Yogyakarta: Aditya Media.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses,* Jakarta: PT Buku Kita.

Yulikuspartono. 2009. *Pengantar Logika dan Algoritma.* Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal dan Skripsi :

Amanda Vitha Kurnia F. 2017. *Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*

Handika Yogasulistyo. 2017. *Efektivitas E-Warong KUBE Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Yogyakarta.*

Ika Surya Kharismawati. 2017. *Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung (Studi Pada Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.*

Mayang Shahira Junaidi. 2017. *The Satisfaction Comparison of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients and Rastra Recipients in Cakung District, East Jakarta*.

Meter, Donald Vam dan Horn, Carl E Van (1975) *The Policy Implementation Process:* A Conceptual Framework, "Administration and Society, Vol 6, No.4

Rachman, Benny., Agustian, A., & Wahyudi. 2018. *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Non Tunai (BPNT)***.** Volume 16 No. 1, Jun 2018: 1-18.

Saleha, Eha. 2005. *Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung Tahun 2004 (skripsi).* Unila.

Suharto, Edi. 2006. *Paradigma Baru studi Kemiskinan, http://immugm.org.public.html.article.php?story=20030911194808123*

Sofar Silaen dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis.* In Media: Jakarta.

Noviantama, Yogi. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Universitas Lampung.*

Sumber Dokumen :

Buku Pedoman Umum BPNT Tahun 2017

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. 2018. *Jumlah KPM BPNT Kota Bandar Lampung dan Rajabasa Jaya.*

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sumber Website:

https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles- dan-hubermen. Diakses pada 18 September 2018, 17.41 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2017/02/23/09190061/pagi.ini.jokowi.luncurkan.bantuan.pangan.non.tunai. Diakses pada 23 September 2018, 22.06 WIB

https://lampungpro.com/post/13221/pemkot-bandar-lampung-larang-tahan-kartu-dan-pungli-bpnt-warga-miskin. Diakses pada 17 September 2018